

GREEN ECONOMY DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI BALI: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Putu Riska Wulandari^{1*}, Kadek Apriada²
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar¹
Universitas Mahasaraswati Denpasar²
Denpasar, Bali^{1,2}
riskawulandari@uhnsugriwa.ac.id^{1*}
kadekapriada@unmas.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the green economy in supporting sustainable development in Bali, particularly within the context of tourism, environmental management, and local governance grounded in cultural values. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) method by examining relevant scholarly articles through structured stages of identification, screening, and thematic synthesis. The findings indicate that the implementation of green economy principles in Bali contributes significantly to sustainable development by promoting sustainable tourism practices, improving natural resource management, and integrating local cultural values into environmental policies. However, the review also reveals several challenges, including limited policy implementation, weak regulatory enforcement, and the predominance of sectoral approaches. The contribution of this study lies in providing a comprehensive synthesis of the green economy literature in the context of Bali and highlighting its relevance to the achievement of selected Sustainable Development Goals (SDGs). The results are expected to serve as a reference for policymakers and future research on green economy-based regional development.

Keywords: *Green economy, sustainable development, Bali, circular economy, cultural governance*

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada 2015, pembangunan berkelanjutan menjadi agenda global yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini secara khusus menempatkan ekonomi hijau sebagai instrumen pencapaian SDGs di Bali, terutama SDG 8 tentang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, SDG 11 mengenai komunitas berkelanjutan, SDG 12 terkait konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta SDG 13 tentang aksi terhadap perubahan iklim. Fokus ini relevan dengan karakteristik Bali sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya yang menghadapi tekanan ekologis yang semakin meningkat. Dalam kerangka tersebut, konsep ekonomi hijau diperkenalkan sebagai pendekatan transformasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan daya dukung ekosistem dan aspek keadilan sosial (UNEP, 2011). Bagi destinasi pariwisata internasional, termasuk Bali, hal ini menghadirkan

dilema: pariwisata menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi sekaligus meningkatkan tekanan ekologis, seperti menyusutnya ruang terbuka hijau, meningkatnya volume limbah, hingga degradasi wilayah pesisir (Cole, 2012; Kurniasari & Rudiarto, 2020).

Bali sebagai salah satu provinsi dengan ketergantungan tinggi pada pariwisata mencatat lebih dari 6,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2024, melampaui kondisi pra-pandemi (BPS Bali, 2024). Pertumbuhan ini memberi dampak positif terhadap perekonomian, namun juga meningkatkan beban lingkungan, termasuk meningkatnya volume sampah, emisi karbon, dan tekanan terhadap daya dukung ekosistem wisata utama (Astuti, 2024; Wulandari, 2024). Penelitian-penelitian terdahulu menegaskan bahwa sektor transportasi dan perhotelan merupakan penyumbang emisi karbon signifikan, sehingga strategi mitigasi seperti pemanfaatan energi terbarukan dan manajemen transportasi berkelanjutan sangat diperlukan (Mendoza et al., 2019; Pratiwi, 2021).

Pertumbuhan pariwisata yang cepat memunculkan berbagai isu seperti degradasi kemampuan daya dukung ekosistem, penanganan limbah yang belum optimal, erosi pantai, dan peningkatan emisi karbon, khususnya di wilayah-wilayah wisata utama Bali. (Wulandari, 2024; Astuti, Virginiya, Bagiastuti, & Septevany, 2024) Misalnya, penelitian *"Multidimensional Challenges Toward Sustainable Development Tourism in Bali"* mencatat bahwa pariwisata internasional di Bali mencapai sekitar 5,27 juta orang pada suatu tahun tertentu, dan tekanan lingkungan termasuk peningkatan limbah, emisi, serta degradasi habitat alami makin nyata (Wulandari, 2024).

Jejak karbon pariwisata Bali memperlihatkan bahwa aktivitas transportasi dan sektor perhotelan menyumbang porsi emisi yang tidak remeh; penelitian yang menakar *carbon footprint* wisatawan menegaskan perlunya strategi mitigasi (misalnya pengalihan ke energi terbarukan, manajemen transportasi berkelanjutan) untuk menurunkan intensitas emisi pariwisata (Mendoza et al., 2019; Pratiwi, 2021). Penelitian-penelitian lain tentang pariwisata hijau di Bali menemukan pula bahwa, meskipun ada inisiatif kebijakan (program pengurangan plastik), implementasi di lapangan masih terhambat oleh kapasitas institusi, pembiayaan, serta kurangnya penerapan indikator-indikator *green economy* secara terpadu (Hastuti, 2024). Kesimpulan ini menegaskan perlunya pendekatan *green economy* yang terukur dan berorientasi bukti untuk mengurangi dampak lingkungan sambil mempertahankan manfaat ekonomi pariwisata (Sara, Sudarma, & Saputra, 2023).

Prianto et al. (2021) menekankan bahwa ekonomi hijau dipandang relevan sebagai strategi alternatif yang berorientasi pada keseimbangan aspek ekonomi, ekologi, serta

dimensi sosial keadilan. Studi tentang sektor perhotelan di Bali juga menunjukkan bahwa pengaruh *green governance*, penghitungan energi (*energy accounting*), dan pengelolaan sumber daya manusia berbasis hijau (*green human resource management*) secara signifikan meningkatkan kinerja keberlanjutan hotel-hotel berbintang. (Kurniawan & Saputra, 2024). Gerakan ekonomi hijau ("*green economy movement*") memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencapaian SDGs desa, terutama ketika dikombinasikan dengan tata kelola hijau (*green governance*) sebagai mediator. Kesadaran, regulasi lokal, dan partisipasi masyarakat sangat menentukan efektivitas *green economy* (Sara, Sudarma, & Saputra, 2023)

Penerapan konsep ekonomi hijau di Bali juga selaras dengan upaya mitigasi dampak pariwisata massal terhadap lingkungan melalui pendekatan *sustainable tourism*. Penelitian terkini menunjukkan bahwa penerapan praktik hijau di sektor transportasi, pengelolaan energi terbarukan, serta pengurangan limbah plastik mampu menurunkan jejak karbon pariwisata secara signifikan (Dewantara & Gaud, 2022). Selain itu, hasil kajian pada destinasi wisata di Bali menegaskan bahwa program *green growth roadmap 2050* yang digagas pemerintah daerah dapat menjadi acuan kebijakan strategis untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan perlindungan ekosistem pesisir dan laut (Wulandari, 2024). Di tingkat komunitas, penguatan ekonomi hijau melalui desa wisata berbasis energi bersih dan pertanian organik terbukti meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kualitas lingkungan (Astuti, Virginiya, Bagiastuti, & Septevany, 2024). Dengan demikian, ekonomi hijau tidak hanya menjadi instrumen kebijakan, melainkan juga kerangka aksi nyata yang dapat mengurangi risiko degradasi lingkungan, meningkatkan resiliensi sosial-ekonomi masyarakat lokal, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Bali.

Meski demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa adopsi praktik ekonomi hijau masih terbatas pada aspek-aspek tertentu seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan fasilitas kebersihan di destinasi wisata, sementara indikator lingkungan lain seperti konservasi keanekaragaman hayati, emisi karbon, dan keadilan sosial belum terpenuhi secara menyeluruh. (Surya Diputra, 2024; Astuti et al., 2024) Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam semua lapisan kebijakan dan praktik pembangunan di Bali. Pembangunan berkelanjutan dalam perspektif *Brundtland Report* (1987) menekankan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dengan tetap menjaga kapasitas generasi mendatang. Konsep ini menegaskan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara intergenerasional (*World*

Commission on Environment and Development, 1987). Sementara itu, teori ekonomi lingkungan menekankan perlunya internalisasi eksternalitas, pengendalian polusi dan degradasi sumber daya, serta kebijakan publik yang mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon. (Tietenberg & Lewis, 2018).

Meskipun terdapat inisiatif kebijakan, misalnya pengurangan plastik sekali pakai, implementasinya masih terkendala kapasitas institusi, keterbatasan pendanaan, serta belum adanya integrasi indikator ekonomi hijau secara menyeluruh (Hastuti, 2024). Hal ini menunjukkan pentingnya kajian literatur yang bersifat sistematis untuk merangkum temuan empiris, menelaah celah pengetahuan, serta merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih kontekstual bagi Bali. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoretis melalui sintesis literatur, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang peka terhadap kondisi lokal. Bali memberikan momentum untuk mempercepat transisi ke ekonomi hijau pada titik kritis pemulihan ekonomi pasca-pandemi, namun terdapat hambatan dalam hal regulasi, kapasitas kelembagaan, kesadaran masyarakat dan industri, serta pengukuran dampak lingkungan yang komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah studi literatur sistematis yang menyatukan bukti empiris terkini, teori pembangunan berkelanjutan dan ekonomi lingkungan, serta indikator-indikator *green economy* yang relevan bagi Bali.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan sintesis sistematis mengenai ekonomi hijau di Bali dengan menekankan integrasi nilai budaya lokal dan keterkaitannya dengan pencapaian SDGs. Pendekatan ini belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat sektoral. Penelitian ini akan membahas konsep dan penerapan ekonomi hijau tantangan, hambatan, serta peluang implementasi ekonomi hijau, indikator-indikator *green economy* dan bagaimana strategi kebijakan yang efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Bali. Dengan demikian, kajian sistematis mengenai ekonomi hijau di Bali menjadi penting untuk menilai sejauh mana pendekatan ini berkontribusi terhadap pencapaian SDGs yang relevan secara kontekstual dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Systematic Literature Review (SLR)*, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu secara sistematis, transparan, serta terstruktur (Kitchenham, 2004). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara *green economy* dan pembangunan

berkelanjutan di Bali. Penelitian ini dilakukan melalui telaah pustaka dari berbagai sumber literatur ilmiah, baik nasional maupun internasional. Sumber data diperoleh dari basis data elektronik seperti Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Google Scholar, dan Garuda (*Garba Rujukan Digital*). Proses pencarian literatur dilakukan pada periode Januari– Agustus 2025. Sampel dalam penelitian ini berupa artikel ilmiah, prosiding, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu hanya memilih literatur yang memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut: 1) Artikel membahas konsep atau implementasi ekonomi hijau (*green economy*) dan/atau pembangunan berkelanjutan; 2) Artikel relevan dengan konteks Indonesia, khususnya Bali, atau memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan berkelanjutan di Bali; 3) Artikel dipublikasikan dalam kurun waktu 2010–2025; 4) Artikel tersedia dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menentukan kata kunci pencarian, yaitu: “*green economy*”, “*sustainable development*”, “*Bali*”, “*ekonomi hijau*”, dan “*pembangunan berkelanjutan*”. Melakukan pencarian literatur di berbagai database akademik, kemudian mengeliminasi duplikasi literatur. melakukan seleksi literatur berdasarkan judul dan abstrak, membaca teks penuh untuk memastikan relevansi dengan penelitian, kemudian menyusun daftar literatur akhir yang akan dianalisis (Moher et al., 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperjelas sintesis hasil penelitian yang telah dibahas, Tabel 1 menyajikan ringkasan temuan utama dari berbagai studi yang dianalisis dalam Systematic Literature Review ini. Tabel tersebut merangkum fokus penelitian, sektor yang dikaji, temuan utama, serta keterkaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam konteks Bali.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terkait Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan di Bali

No	Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Sektor/Isu Utama	Temuan Utama	Relevansi SDGs
1	Cole (2012); Cole & Browne (2015)	Ekologi politik pariwisata	Air & pariwisata	Pariwisata memperparah ketimpangan akses air dan tekanan ekosistem	SDG 6, 12
2	Mendoza et al. (2019)	Jejak karbon pariwisata	Energi & transportasi	Transportasi dan hotel menyumbang emisi signifikan	SDG 7, 13

3	Pratiwi (2021)	Green tourism	Pengelolaan sampah	Praktik hijau mampu menurunkan dampak lingkungan pariwisata	SDG 11, 12
4	Wicaksana (2019)	Energi terbarukan	PLTS rooftop	PLTS potensial menurunkan emisi namun masih terbatas skala	SDG 7, 13
5	Dwipradnyana (2017)	Pertanian berkelanjutan	Subak & pertanian	Pertanian organik memperkuat ketahanan pangan dan budaya	SDG 2, 15
6	Sara et al. (2023)	Green governance desa	Desa adat	Green governance meningkatkan capaian SDGs desa	SDG 8, 11, 16
7	Astuti et al. (2024)	Pariwisata hijau	Lingkungan & ekonomi lokal	Ekowisata meningkatkan pendapatan dan kualitas lingkungan	SDG 8, 12
8	Kurniawan & Saputra (2024)	Green governance hotel	Perhotelan	Green HRM dan energy accounting meningkatkan kinerja keberlanjutan	SDG 8, 12
9	Wulandari (2024)	Tantangan multidimensi	Pariwisata Bali	Daya dukung lingkungan semakin tertekan	SDG 11, 13
10	Suasih (2024)	Kebijakan sampah	Plastik sekali pakai	Implementasi kebijakan masih lemah di tingkat pengawasan	SDG 12, 14

(Sumber : Literatur review peneliti, 2025)

Ringkasan ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai ekonomi hijau di Bali masih didominasi oleh sektor pariwisata dan pengelolaan lingkungan, sementara integrasi lintas sektor dan pengukuran indikator hijau secara komprehensif masih terbatas.

1. Konsep dan Penerapan Ekonomi Hijau Dengan Pembangunan Berkelanjutan Di Bali

Konsep ekonomi hijau dalam pembangunan berkelanjutan di Bali dipahami melalui dua dimensi utama. Dimensi pertama menekankan ekonomi hijau sebagai transformasi pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial sesuai prinsip *triple bottom line* (UNEP, 2011; Kurniasari & Rudiarto, 2020), yang mulai diintegrasikan dalam pengelolaan desa wisata (Putra, 2020) serta didukung oleh kearifan lokal Tri Hita Karana dalam kebijakan energi daerah Bali (Wulandari et al., 2024). Dimensi kedua mengaitkan penerapan ekonomi hijau dengan pariwisata berkelanjutan melalui pengelolaan energi, air, dan limbah yang lebih efisien (Cole, 2012; Pratiwi, 2021), termasuk strategi pariwisata hijau (Astuti et al., 2024) serta

kebijakan pengurangan plastik sekali pakai dan penguatan bank sampah berbasis desa adat (Suasih, 2024). Literatur internasional juga menegaskan urgensi pendekatan keberlanjutan akibat ketimpangan distribusi air yang dipicu tekanan sektor pariwisata di Bali (Cole, 2012; Cole & Browne, 2015).

Dimensi ketiga menyoroti penerapan ekonomi hijau pada sektor pertanian organik dan energi terbarukan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menjaga daya dukung lingkungan (Mendoza et al., 2019; Wulandari, 2024). Studi di Bali menunjukkan potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala rumah tangga dan desa (Wicaksana, 2019), serta revitalisasi sistem Subak melalui pertanian organik yang memperkuat ketahanan pangan dan pelestarian budaya lokal (Dwipradnyana, 2017; Wulandari et al., 2023). Literatur internasional juga menegaskan peran inovasi energi terbarukan dan ekowisata sebagai fondasi transisi menuju ekonomi hijau di destinasi wisata (Pan et al., 2018). Selain itu, keterlibatan aktor lokal dan dukungan kebijakan daerah menjadi faktor penting dalam implementasi ekonomi hijau di Bali, seperti kebijakan Bali Energi Bersih dan pengelolaan sampah berbasis desa adat (Wulandari et al., 2024). Kebijakan larangan plastik sekali pakai mendorong perubahan perilaku konsumsi, meskipun masih menghadapi kendala pengawasan dan penegakan hukum (Suasih, 2024; Kubontubuh, 2019). Peran desa adat dalam pengembangan bank sampah dan pengelolaan limbah berbasis komunitas juga terbukti meningkatkan kualitas lingkungan dan nilai ekonomi lokal (Putra, 2020; Wiriastika, 2022).

Dari sisi kebijakan energi, implementasi Bali Energi Bersih melalui program PLTS *rooftop* di perkantoran pemerintah masih bersifat *pilot project* dan belum mampu memenuhi target transisi energi yang ambisius (Wicaksana, 2019). Literatur menunjukkan bahwa meskipun kebijakan daerah merupakan instrumen penting pembangunan hijau, kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasi masih menjadi persoalan utama (Cole, 2012; Gössling, 2015). Keberhasilan ekonomi hijau sangat bergantung pada partisipasi masyarakat lokal dan kolaborasi lintas sektor, khususnya keterlibatan desa adat dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya (Cole & Browne, 2015), serta integrasi kebijakan yang lebih kuat agar program hijau tidak berhenti pada tahap percontohan (Pan et al., 2018). Secara konseptual, literatur memandang ekonomi hijau di Bali sebagai pendekatan integratif yang menekankan keberlanjutan jangka panjang melalui perspektif *triple bottom line* (Elkington, 1997), terutama pada sektor pariwisata yang menjadi penggerak ekonomi utama namun menghadapi tekanan lingkungan akibat urbanisasi dan eksploitasi sumber daya (Cole, 2012). Penerapan pariwisata berkelanjutan sejalan dengan agenda SDGs, khususnya

tujuan ke-8 dan ke-12, melalui praktik seperti *eco-tourism* dan pengelolaan limbah berbasis komunitas (Pratiwi, 2021). Meski demikian, implementasi masih dibatasi oleh lemahnya regulasi, koordinasi antar-stakeholder, dan kapasitas masyarakat dalam mengadopsi praktik ramah lingkungan (Kurniasari & Rudiarto, 2020).

Dengan demikian, literatur yang ada menegaskan bahwa penerapan ekonomi hijau di Bali masih berada pada tahap awal. Implementasi cenderung parsial dan belum menjadi *mainstream policy*. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi yang lebih kuat antara kebijakan daerah, partisipasi masyarakat lokal, dan dukungan sektor swasta untuk memperluas penerapan ekonomi hijau di berbagai bidang pembangunan.

2. Tantangan, Hambatan, serta Peluang Implementasi Ekonomi Hijau dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Bali

Kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, daur ulang, dan sanitasi di Bali masih menjadi persoalan mendasar dalam implementasi ekonomi hijau. Fasilitas pengumpulan dan pemrosesan sampah, baik plastik, kayu, maupun organik, dinilai belum memadai sehingga menimbulkan akumulasi sampah di kawasan pantai, menurunkan daya tarik wisata, sekaligus mengancam daya dukung lingkungan jangka panjang (*End Plastic Waste*, 2020). Studi kasus menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai proyek pengelolaan limbah berskala besar, seperti program daur ulang plastik dan pembangunan fasilitas pengolahan organik, banyak di antaranya menghadapi kendala operasional, pembiayaan, serta kurangnya dukungan teknis berkelanjutan (*The Guardian*, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan sampah di Bali tidak hanya dapat diselesaikan melalui kebijakan normatif, tetapi juga membutuhkan investasi serius pada aspek infrastruktur fisik, seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan, fasilitas komposting atau biogas, serta sistem daur ulang terdesentralisasi yang mampu mendekatkan pengolahan sampah ke sumbernya (Muliarta, 2023).

Tanpa adanya investasi tersebut, sulit bagi Bali untuk mengimplementasikan konsep *circular economy* secara efektif karena masih terdapat kesenjangan antara regulasi, praktik lapangan, dan kapasitas teknis (Sara, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa solusi ekonomi hijau harus dipandang secara komprehensif, tidak hanya menitikberatkan pada kebijakan atau regulasi, melainkan juga pada kebutuhan modal fisik dan teknis, termasuk pelatihan operator serta pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan (Suryawan, 2025). Sejumlah studi terbaru juga menyoroti pemanfaatan teknologi inovatif, seperti penggunaan *smart bins*, sensor IoT untuk pemantauan volume

sampah, serta sistem gamifikasi untuk mendorong partisipasi masyarakat. Namun, meskipun menjanjikan sebagai solusi percontohan, implementasi teknologi tersebut masih terkendala masalah biaya, keterbatasan literasi digital masyarakat, dan skalabilitas dalam jangka panjang (Tundjungsari, 2025). Dengan demikian, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan integrasi teknologi tepat guna menjadi prasyarat penting agar ekonomi hijau di Bali dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Hambatan kebijakan dan tata kelola dalam implementasi ekonomi hijau di Bali masih cukup kompleks. Fragmentasi kewenangan antar tingkat pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga desa adat, sering menimbulkan inkonsistensi dalam perumusan dan pelaksanaan program lingkungan. Hal ini berdampak pada lemahnya koordinasi antar-stakeholder serta rendahnya efektivitas implementasi kebijakan hijau (Sara, 2023). Selain itu, sejumlah inisiatif hijau yang diluncurkan, terutama yang bersumber dari donor internasional, masih bersifat sementara (*donor-driven projects*) sehingga keberlanjutan program kurang terjamin apabila tidak terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak memiliki model bisnis yang jelas (Muliarta, 2023). Penelitian pada tingkat desa juga menggarisbawahi pentingnya “*green governance*” berbasis komunitas untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat lokal, di mana desa adat berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat (Sara, 2023; Diputra, 2024).

Kebijakan yang tumpang tindih, lemahnya koordinasi, dan minimnya monitoring berbasis indikator yang konsisten menyebabkan adopsi praktik hijau berjalan lambat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dibutuhkan integrasi kebijakan lintas sektor (*policy alignment*), terutama antara kebijakan pariwisata, lingkungan hidup, dan ekonomi daerah (Suryawan, 2025). Mekanisme insentif juga penting, seperti pemberian subsidi bagi investasi energi terbarukan, insentif pajak untuk hotel dan restoran yang menerapkan standar ramah lingkungan, serta skema kredit lunak bagi UMKM yang mengadopsi praktik hijau (Elizabeth, 2025). Selain itu, pengembangan indikator kinerja *green economy* yang seragam akan membantu dalam mengevaluasi sejauh mana efektivitas program dapat diukur secara transparan (Pan et al., 2018). Perlunya *governance* yang partisipatif dengan melibatkan desa adat, pelaku pariwisata, sektor swasta, dan masyarakat lokal sebagai bentuk kolaborasi multi-pihak yang dapat meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan program ekonomi hijau di Bali (Heriani, 2025).

Implementasi ekonomi hijau di Bali tidak terlepas dari pengaruh faktor sosio-kultural dan ekonomi yang membentuk pola perilaku masyarakat maupun pelaku usaha. Secara kultural, tradisi, struktur masyarakat adat, serta persepsi terhadap perubahan sering kali menentukan sejauh mana masyarakat menerima praktik ramah lingkungan. Misalnya, pengelolaan sumber daya alam berbasis adat atau *banjar* telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal, tetapi belum sepenuhnya diselaraskan dengan prinsip ekonomi hijau modern (Heriani, 2025). Di sisi lain, secara ekonomi, ketergantungan masyarakat Bali pada pariwisata massal yang berorientasi kuantitas, serta keterbatasan modal yang dimiliki oleh UMKM, membuat adopsi teknologi hijau atau standar keberlanjutan menjadi lebih lambat (Elizabeth, 2025). Kurangnya literasi lingkungan dan keterampilan hijau di kalangan pelaku UMKM pariwisata menambah kompleksitas hambatan, sebab inovasi berkelanjutan membutuhkan kapasitas teknis dan kesadaran ekologis yang memadai (Sara, 2023).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, intervensi kebijakan dan program pembangunan harus peka terhadap aspek budaya lokal. Integrasi nilai-nilai adat, seperti konsep *Tri Hita Karana* atau sistem pengelolaan berbasis *banjar*, dapat menjadi modal sosial yang memperkuat inisiatif hijau bila difasilitasi secara tepat (Diputra, 2024). Selain itu, dukungan berupa pelatihan keterampilan hijau, pemberian insentif melalui skema mikro-kredit ramah lingkungan, serta penerapan program *co-benefit* seperti sertifikasi hijau pada sektor akomodasi dan pariwisata dapat membantu UMKM mengatasi hambatan ekonomi. Sertifikasi tersebut bukan hanya meningkatkan kredibilitas, tetapi juga berpotensi mendorong wisatawan untuk membayar harga premium, sehingga memberikan keuntungan finansial bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat keberlanjutan lingkungan (Muliarta, 2023). Dengan demikian, solusi atas hambatan sosial-ekonomi dan budaya dalam penerapan ekonomi hijau di Bali memerlukan pendekatan kolaboratif yang menggabungkan modal budaya, insentif ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Peluang Implementasi Ekonomi Hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Bali yaitu pertama, sektor pariwisata hijau dan premiumisasi produk lokal menghadirkan peluang besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Bali. Permintaan pasar internasional terhadap *green tourism* meningkat signifikan, terutama pasca-pandemi ketika wisatawan cenderung memilih destinasi yang lebih ramah lingkungan dan autentik (Gössling & Hall, 2019). Destinasi seperti Ubud telah menjadi studi kasus penting yang menunjukkan adanya potensi *green premium*, di mana wisatawan bersedia membayar lebih untuk layanan ramah lingkungan dan program

konservasi berbasis budaya (Putra & Yudiana, 2023). Premiumisasi produk lokal berbasis kearifan tradisional, seperti produk organik dan kerajinan bambu berkelanjutan, juga berpotensi memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga identitas budaya (Nugraha & Dewi, 2022).

Kedua, ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah menjadi peluang strategis dalam menekan eksternalitas lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Model *circular economy* berbasis pengomposan organik, daur ulang plastik, dan pemanfaatan limbah sebagai energi alternatif terbukti mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru (Kalmykova et al., 2018). Studi di Bali menunjukkan bahwa pengolahan sampah berbasis komunitas tidak hanya menurunkan volume limbah yang berakhir di TPA, tetapi juga dapat direplikasi pada skala lebih luas untuk mendukung target SDG (Pramudiarta, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa *circular economy* tidak hanya relevan sebagai konsep, tetapi juga berfungsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi hijau di tingkat lokal.

Ketiga, peluang lain muncul dari inovasi UMKM dan *green service innovation*. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Bali memiliki kapasitas dinamis untuk mengadopsi inovasi hijau, baik dalam bentuk teknologi ramah lingkungan maupun layanan berbasis keberlanjutan. Studi empiris menunjukkan bahwa inovasi hijau berperan sebagai mediator penting dalam meningkatkan kinerja bisnis pariwisata, dengan dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan (Haseeb et al., 2019; Suryani & Mahadewi, 2023). Dengan demikian, mendorong UMKM untuk mengembangkan *eco-product*, *eco-service*, dan *eco-certification* dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi hijau.

Keempat, peran governance lokal dan desa adat merupakan peluang unik di Bali. Desa adat yang menerapkan *green governance* dapat berfungsi sebagai laboratorium sosial-ekonomi berskala kecil untuk menguji praktik berkelanjutan. Inisiatif desa hijau di Bali menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adat mampu mempercepat implementasi SDG lokal dan meningkatkan peluang memperoleh akses pendanaan dari program nasional maupun internasional (Ardika, 2020; Dwipayana, 2022). Model *co-management* antara desa adat, pelaku pariwisata, dan pemerintah dapat memperkuat legitimasi kebijakan hijau dan memperluas dampak positifnya.

Secara keseluruhan, peluang ini menunjukkan bahwa Bali memiliki potensi besar untuk menjadi model pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau, dengan memadukan aspek pariwisata hijau, ekonomi sirkular, inovasi UMKM, dan *green governance* lokal.

3. Indikator-Indikator *Green Economy* Yang Relevan Bagi Bali Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Bali

Indikator-indikator green economy dalam konsep pembangunan berkelanjutan berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas transisi menuju ekonomi hijau. Secara teoritis, Hal ini relevan dengan kondisi Bali karena menurut UNEP (2011) menggarisbawahi bahwa indikator *green economy* harus mencakup efisiensi sumber daya, keadilan sosial, serta perlindungan ekosistem. Kerangka ini diperkuat oleh konsep *triple bottom line* (Elkington, 1997) yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada level praktis, literatur tentang green economy menekankan pentingnya indikator kuantitatif (misalnya proporsi energi terbarukan, pengurangan emisi) dan indikator kualitatif (misalnya tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam praktik berkelanjutan) (OECD, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa Bali membutuhkan indikator yang tidak hanya menilai performa teknis, tetapi juga relevan dengan struktur sosio-kultural lokal.

Pertama, indikator pada energi terbarukan dan efisiensi energi menjadi salah satu pilar utama green economy. Bali masih sangat bergantung pada energi fosil dengan kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi di bawah 10% (Kementerian ESDM, 2023). Menurut teori transisi energi (*energy transition theory*), keberhasilan ekonomi hijau sangat ditentukan oleh substitusi energi berbasis fosil menuju energi bersih (Geels, 2014). Studi Suryani dan Mahadewi (2023) menunjukkan bahwa adopsi teknologi panel surya oleh akomodasi pariwisata di Bali mampu menurunkan emisi karbon hingga 30% dan sekaligus meningkatkan citra destinasi ramah lingkungan. Dengan demikian, indikator seperti persentase energi terbarukan dalam bauran energi dan efisiensi energi pada sektor pariwisata dapat menjadi ukuran penting bagi Bali.

Kedua, indikator pengelolaan limbah dan *circular economy* sangat relevan karena Bali menghadapi tekanan besar akibat akumulasi sampah plastik, terutama di kawasan wisata. Konsep *circular economy* (Kalmykova et al., 2018) menekankan pentingnya pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sebagai strategi ekonomi yang menekan eksternalitas negatif. Penelitian Pramudiarta (2021) di Denpasar menemukan bahwa pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui komposting organik mampu menurunkan timbulan sampah hingga 25% sekaligus menghasilkan produk pupuk organik bernilai ekonomi. Selain itu, proyek pilot pengolahan plastik menjadi bahan bakar alternatif di Bali menunjukkan potensi untuk direplikasi di wilayah lain (Suryawan, 2025).

Oleh karena itu, indikator yang relevan meliputi tingkat daur ulang plastik, proporsi sampah organik yang dikomposkan, serta jumlah TPA yang berhasil dialihkan melalui skema ekonomi sirkular.

Ketiga, indikator pariwisata hijau sangat krusial mengingat Bali adalah destinasi internasional dengan kontribusi sektor pariwisata yang signifikan terhadap PDRB. Konsep *sustainable tourism* menurut Gössling dan Hall (2019) menekankan pentingnya indikator yang mengukur keberlanjutan industri wisata, seperti penggunaan energi, manajemen limbah, dan dampak sosial budaya. Studi Putra dan Yudiana (2023) mengenai Ubud menunjukkan bahwa wisatawan bersedia membayar *green premium* untuk akomodasi yang memiliki sertifikasi hijau dan menerapkan praktik ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan temuan Suryani dan Mahadewi (2023) yang menekankan bahwa inovasi layanan hijau pada UMKM pariwisata meningkatkan kinerja bisnis dan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, indikator seperti jumlah hotel/restoran bersertifikat hijau, tingkat adopsi eco-label, dan proporsi wisatawan yang memilih paket wisata berkelanjutan sangat relevan diterapkan di Bali.

Keempat, indikator inklusivitas sosial dan ekonomi lokal merupakan dimensi penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi hijau tidak hanya dinikmati oleh pelaku besar, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat adat dan UMKM. Teori *green governance* (Meadowcroft, 2007) menekankan perlunya partisipasi *multi-stakeholder*, termasuk komunitas lokal, dalam implementasi kebijakan hijau. Sara (2023) dalam penelitiannya di desa-desa Bali menunjukkan bahwa partisipasi desa adat dalam pengelolaan lingkungan berbasis *Tri Hita Karana* memperkuat legitimasi program hijau sekaligus memastikan keberlanjutan sosial-budaya. Selain itu, Dwipayana (2022) menambahkan bahwa tingkat partisipasi UMKM dalam rantai nilai hijau dapat dijadikan indikator inklusivitas ekonomi. Oleh karena itu, indikator relevan meliputi jumlah desa adat yang menerapkan *green governance*, proporsi UMKM yang mengadopsi praktik ramah lingkungan, serta akses masyarakat lokal terhadap pendanaan hijau.

Secara keseluruhan, indikator *green economy* yang relevan bagi Bali meliputi (1) proporsi energi terbarukan dalam bauran energi dan efisiensi energi; (2) tingkat daur ulang, komposting, dan pengurangan sampah plastik; (3) jumlah destinasi/akomodasi bersertifikat hijau dan adopsi *eco-label*; serta (4) tingkat partisipasi UMKM dan desa adat dalam ekonomi hijau. Indikator-indikator ini tidak hanya merefleksikan kerangka global pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memperhitungkan dimensi sosio-kultural Bali yang khas, terutama filosofi *Tri Hita Karana* sebagai landasan etis pembangunan yang harmonis.

4. Strategi kebijakan yang efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Bali.

Strategi kebijakan yang efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Bali harus bersifat integratif, peka terhadap konteks lokal, dan berbasis bukti. Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama implementasi ekonomi hijau di Bali adalah fragmentasi kebijakan antar level pemerintahan, dari provinsi hingga desa adat. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang kuat sering kali menyebabkan program hijau berhenti pada tahap uji coba atau bergantung pada donor, tanpa terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan *policy alignment* yang harmonis, di mana kebijakan provinsi, kabupaten, hingga desa adat berjalan searah. Konsep *policy coherence* dalam teori tata kelola pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keselarasan lintas-level sebagai prasyarat keberhasilan transisi hijau (Sara, 2023). Forum koordinasi permanen antar OPD, Bappeda, desa adat, dan sektor swasta dapat menjadi wadah untuk memastikan kebijakan lingkungan, pariwisata, dan ekonomi saling mendukung.

Selain aspek kelembagaan, strategi pendanaan juga menjadi elemen kunci. Sebagian besar program hijau di Bali masih bergantung pada bantuan donor, sehingga keberlanjutannya sering terhenti setelah periode pendanaan berakhir. Literatur merekomendasikan pembiayaan inovatif seperti *tourist environmental surcharge* (Clean Bali Fund), *blended finance* yang memadukan APBD, investasi swasta, dan hibah internasional, serta skema kredit hijau bagi UMKM (Global Infrastructure Facility, 2023). Studi di berbagai daerah menunjukkan bahwa instrumen fiskal lokal yang transparan dan diarahkan untuk program lingkungan terbukti meningkatkan kapasitas pembiayaan jangka panjang. Dengan demikian, pemerintah Bali dapat mengadopsi pungutan lingkungan kecil dari sektor pariwisata dan menyalurkannya untuk pengelolaan sampah, energi terbarukan, serta konservasi budaya.

Investasi pada infrastruktur hijau juga menjadi strategi penting yang harus diprioritaskan. Kasus kegagalan fasilitas daur ulang di Bali yang kewalahan menerima sampah menunjukkan bahwa kelemahan terbesar bukan pada penyediaan infrastruktur, melainkan pada kapasitas operasional dan pemeliharaan jangka panjang (The Guardian, 2024). Sebaliknya, inisiatif pengolahan organik berbasis komunitas terbukti lebih berkelanjutan karena memiliki model bisnis lokal yang jelas (Danielson, 2020). Oleh karena itu, strategi kebijakan yang efektif harus mengutamakan pengembangan fasilitas komposting, biogas, dan sistem pemilahan sampah di tingkat desa, sekaligus

mendukung pengembangan infrastruktur energi terbarukan seperti PLTS atap pada sektor pariwisata.

Di sektor ekonomi, peluang besar terletak pada pariwisata hijau dan UMKM berorientasi ramah lingkungan. Permintaan pasar internasional terhadap *green tourism* memberikan kesempatan bagi Bali untuk memperoleh *green premium* dari wisatawan yang bersedia membayar lebih untuk layanan ramah lingkungan (Law, 2016). Untuk mendorong hal ini, pemerintah dapat memberlakukan regulasi sertifikasi hijau yang terjangkau serta memberikan insentif berupa keringanan pajak atau akses kredit lunak kepada UMKM yang memenuhi standar tersebut. Strategi ini sejalan dengan konsep *ecolabeling* dan *green innovation* yang terbukti meningkatkan daya saing UMKM sekaligus menurunkan dampak lingkungan (Suryawan, 2025).

Lebih jauh, literatur menekankan pentingnya penguatan kapasitas lokal dengan mengakui peran desa adat sebagai aktor sentral dalam pengelolaan sumber daya. Desa adat di Bali memiliki struktur sosial yang kokoh serta norma kolektif yang dapat dimobilisasi untuk mendukung inisiatif hijau (Sara, 2023). Integrasi nilai-nilai lokal seperti *Tri Hita Karana* dalam kebijakan hijau dapat meningkatkan legitimasi dan kepatuhan masyarakat. Pendekatan peka budaya ini sejalan dengan teori *community-based natural resource management* yang menekankan bahwa pengelolaan lingkungan akan lebih efektif jika berakar pada kearifan lokal. Oleh karena itu, program pelatihan keterampilan hijau, penguatan kapasitas manajemen desa, dan kolaborasi co-management antara pemerintah formal dengan prajuru adat menjadi strategi yang sangat relevan.

Akhirnya, keberhasilan kebijakan hijau membutuhkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator. Tanpa indikator kinerja yang jelas, sulit menilai efektivitas program serta menjustifikasi alokasi anggaran jangka panjang. Studi dari UN-PAGE (2024) merekomendasikan penggunaan indikator inti seperti tingkat daur ulang sampah, persentase energi terbarukan, jumlah lapangan kerja hijau, dan persentase akomodasi bersertifikasi ramah lingkungan. Pemerintah Bali dapat mengadopsi sistem dashboard publik dengan pelaporan tahunan serta evaluasi independen, sehingga akuntabilitas kebijakan lebih terjamin. Dengan cara ini, pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi jargon, melainkan terukur, dapat dipantau, dan dapat dievaluasi secara transparan.

Secara keseluruhan, strategi kebijakan efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Bali mencakup integrasi lintas-level pemerintahan, pembiayaan inovatif, investasi pada infrastruktur hijau, regulasi dan insentif bagi UMKM, penguatan peran desa adat, serta sistem monitoring indikator. Kombinasi strategi ini, bila dilaksanakan

secara konsisten, berpotensi membawa Bali menuju transisi ekonomi hijau yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan global sekaligus menjaga identitas budaya lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah sistematis terhadap sepuluh artikel ilmiah yang relevan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ekonomi hijau di Bali berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor pariwisata, pengelolaan lingkungan, dan tata kelola desa adat. Integrasi nilai budaya lokal dengan kebijakan ekonomi hijau menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi di tingkat daerah. Pertama, hasil telaah literatur menunjukkan bahwa konsep ekonomi hijau dalam konteks Bali dipahami sebagai upaya mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kelestarian budaya melalui pendekatan berbasis pariwisata berkelanjutan, ekonomi sirkular, serta pemanfaatan energi terbarukan. Penerapannya diidentifikasi dalam berbagai inisiatif lokal, mulai dari program desa adat hingga kebijakan provinsi, meskipun masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kedua, penelitian menemukan sejumlah tantangan dan hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah dan energi, fragmentasi kebijakan lintas-level pemerintahan, serta hambatan sosial-ekonomi dan budaya yang memperlambat adopsi praktik hijau. Namun demikian, peluang besar tetap terbuka melalui pengembangan pariwisata hijau, penerapan model ekonomi sirkular, inovasi UMKM ramah lingkungan, serta peran aktif desa adat dalam tata kelola hijau.

Ketiga, indikator-indikator ekonomi hijau yang relevan bagi Bali meliputi persentase penggunaan energi terbarukan, tingkat daur ulang dan komposting, jumlah destinasi pariwisata dan UMKM bersertifikasi hijau, penciptaan lapangan kerja hijau, serta partisipasi desa adat dalam program lingkungan. Indikator ini sejalan dengan kerangka pembangunan berkelanjutan global, namun tetap berakar pada nilai lokal seperti *Tri Hita Karana*.

Keempat, strategi kebijakan yang efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Bali harus menekankan integrasi lintas-level pemerintahan (*policy alignment*), pembiayaan inovatif seperti *tourist surcharge* dan kredit hijau, investasi pada infrastruktur hijau, pemberian insentif regulatif dan fiskal bagi UMKM serta sektor pariwisata, penguatan peran desa adat, dan pengembangan sistem monitoring berbasis indikator hijau.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan di Bali dapat dicapai melalui kombinasi kebijakan yang integratif, partisipatif, dan berbasis budaya lokal. Sumbangan utama penelitian ini adalah memberikan kerangka konseptual dan praktis yang dapat digeneralisasikan, bahwa implementasi ekonomi hijau di daerah pariwisata berbasis budaya seperti Bali menuntut keseimbangan antara kebijakan modern, dukungan pembiayaan, dan kearifan lokal sebagai fondasi utama.

SARAN

Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan kajian empiris berbasis data lapangan untuk mengukur efektivitas implementasi ekonomi hijau di Bali, baik melalui survei kuantitatif terhadap pelaku UMKM, desa adat, dan sektor pariwisata, maupun melalui studi longitudinal guna melihat keberlanjutan program dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian komparatif antar daerah wisata di Indonesia maupun negara lain dengan karakteristik budaya serupa dapat memberikan perspektif perbandingan yang lebih luas. Kajian mendalam mengenai integrasi kearifan lokal, khususnya filosofi *Tri Hita Karana*, ke dalam indikator *green economy* juga penting dilakukan agar kerangka evaluasi pembangunan berkelanjutan di Bali lebih kontekstual, terukur, dan aplikatif.

REFERENSI

- Ardika, I. W. 2020. Green governance berbasis desa adat dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 10(2), 345–362. <https://doi.org/10.24843/JKB>
- Astuti, N. N. S., Virginiya, P. T., Bagiasuti, N. K., & Septevany, E. 2024. *The future of green tourism in Bali: Challenges and opportunities*. *Journal of Applied Sciences in Travel and Hospitality*, 7(2), 178-195. <https://doi.org/10.31940/jasth.v7i2.178-195> ojs2.pnb.ac.id
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2024. *Perkembangan pariwisata Provinsi Bali-April 2024* (Press release). <https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2024/06/03/717894/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-april-2024.html> Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
- Cole, S. 2012. A political ecology of water equity and tourism: A case study from Bali. *Annals of Tourism Research*, 39(2), 1221–1241. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.01.003>
- Cole, S., & Browne, M. 2015. Tourism and water inequity in Bali: A social-ecological systems analysis. *Human Ecology*, 43(3), 439–450. <https://doi.org/10.1007/s10745-015-9749-z>
- Danielson, F. 2020. Community-based waste management in Bali: Lessons from organic waste innovation. *Journal of Environmental Management*, 268, 110703. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110703>

- Dewantara, M. Y., & Gaud, G. (2022). Strategi penerapan praktik hijau pada sektor pariwisata dalam menurunkan jejak karbon. *Jurnal Kepariwisata dan Perhotelan*, 6(1), 45-58.
- Diputra, G. I. S. 2024. Penerapan green economy pada sektor pariwisata di Bali. *Ekuihnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 101–112. <https://doi.org/10.36985/ekuihnomi.v6i2.1148>
- Dwipayana, I. M. 2022. Peran desa adat dalam pencapaian SDGs di Bali. *Journal of Local Government Studies*, 14(1), 112–128.
- Dwipradnyana, I. M. 2017. Tantangan regenerasi petani Bali dalam mempertahankan Subak sebagai warisan budaya dunia. *Jurnal Kajian Bali*. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1698054>
- Elizabeth, E. 2025. The mediating role of green service innovation in Bali's tour and travel SMEs. *Sustainability*, 17(6), 3120. <https://doi.org/10.3390/su17063120>
- Elkington, J. 1997. *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone.
- End Plastic Waste. 2020. *Organic waste processing in Bali for plastic circularity*. End Plastic Waste Insights. Retrieved from <https://endplasticwaste.org>
- Geels, F. W. 2014. Regime resistance against low-carbon transitions: Introducing politics and power into the multi-level perspective. *Theory, Culture & Society*, 31(5), 21–40. <https://doi.org/10.1177/0263276414531627>
- Global Infrastructure Facility. 2023. *Blended finance for sustainable infrastructure: Policy frameworks and case studies*. Washington DC: World Bank.
- Gössling, S., & Hall, C. M. 2019. Sustainable tourism and the green economy. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 1027–1040. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1569071>
- Haseeb, M., Hussain, H. I., Kot, S., Androniceanu, A., & Jermisittiparsert, K. 2019. Role of green innovation in sustainable business performance: The case of manufacturing SMEs in Malaysia. *Sustainability*, 11(20), 1–14. <https://doi.org/10.3390/su11205811>
- Hastuti, A. W. 2024. *Spatiotemporal analysis of shoreline change trends and coastal dynamics in Bali (2016–2021)*. *Journal / ScienceDirect* (artikel 2024). ScienceDirect
- Heriani, H. 2025. Green tourism: New economic opportunities in the sustainable era in Ubud, Bali. *European Journal of Environmental and Sustainable Energy Trends*, 4(1), 55–66. <https://doi.org/10.56748/ejeset.v4i1.512>
- Kalmykova, Y., Sadagopan, M., & Rosado, L. 2018. Circular economy—From review of theories and practices to development of implementation tools. *Resources, Conservation and Recycling*, 135, 190–201. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.10.034>
- Kementerian ESDM. 2023. *Statistik energi baru terbarukan Indonesia 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal EBTKE.
- Kitchenham, B. 2004. *Procedures for performing systematic reviews*. Keele University Technical Report TR/SE-0401. <https://doi.org/10.1145/1134285.1134500>
- Kubontubuh, E. D. 2019. Bali Bebas Sampah Plastik (Menuju Clean and Green Island). *Jurnal Bappeda Litbang Provinsi Bali*, 9(2), 33–47. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1765650>
- Kurniasari, N., & Rudiarto, I. 2020. Dinamika perubahan lahan sawah di Bali: Implikasi terhadap keberlanjutan lingkungan dan pangan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 16(4), 221–234. <https://doi.org/10.14710/pwk.v16i4.27427>
- Kurniawan, K. A. S., & Saputra, P. A. 2024. *The Influence of Green Governance, Implementation of Energy Accounting, and Green Human Resource Management on Sustainability Performance: An Empirical Study in the*

- Hospitality Industry in Bali*. JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi). <https://doi.org/...>
Ejournal Universitas Pendidikan Ganesha
- Law, R. 2016. The impact of green tourism on tourist willingness to pay: Evidence from Asian destinations. *Journal of Sustainable Tourism*, 24(5), 730–746. <https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1091467>
- Meadowcroft, J. 2007. Who is in charge here? Governance for sustainable development in a complex world. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 9(3–4), 299–314. <https://doi.org/10.1080/15239080701631544>
- Mendoza, G. A., et al. 2019. Integrating renewable energy and sustainable agriculture: Case studies from Southeast Asia. *Renewable Energy*, 140, 21–29. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.02.030>
- Mendoza, G. A., Prabhu, R., & Herawati, H. 2019. Green economy approaches in tropical forest landscapes: A review. *Forest Policy and Economics*, 102, 19–29. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.006>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. 2009. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Muliarta, I. N. 2023. The concept of circular economy in the implementation of source-based waste management in Bali. *Indonesian Journal of Agriculture and Environmental Analytics*, 2(2), 125–132. <https://doi.org/10.55927/ijaea.v2i2.5456>
- Nugraha, I. G., & Dewi, A. A. 2022. Premiumisasi produk lokal berbasis keberlanjutan di Bali. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 17(3), 211–225.
- OECD. (2019). Accelerating climate action: Refocusing policies through a well-being lens. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/2f4adcd4-en>
- Pan, S. Y., Gao, M., Kim, H., Shah, K. J., Pei, S. L., & Chiang, P. C. 2018. Advances and challenges in sustainable tourism toward a green economy. *Science of the Total Environment*, 635, 452–469. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.134>
- Pramudiarta, I. G. 2021. Implementasi circular economy pada pengelolaan sampah rumah tangga di Bali. *Jurnal Lingkungan Tropis*, 15(1), 45–59.
- Pratiwi, A. 2021. Strategi pengelolaan sampah berbasis green economy di kawasan pariwisata Bali. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(2), 145–158. <https://doi.org/10.14203/jep.2021.v29i2.572>
- Pratiwi, I. 2021. Sustainable tourism practices in Bali: Pathways to green economy. *Journal of Cleaner Production*, 278, 123905. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123905>
- Prianto, A., Anbia, E. F., Wulan, G. M. R., & Panggabean, N. 2021. *Tinjauan Penerapan Ekonomi Hijau Dalam Pariwisata di Provinsi Bali*. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi (JIST)*, 2(1), 74–... <https://doi.org/10.59141/jist.v2i01.74> *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*
- Putra, I. G. B. N. P. 2020. Penerapan konsep triple bottom line accounting di desa wisata Pelaga: Studi kasus. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1534487>
- Putra, I. W., & Yudiana, I. M. 2023. Green premium dalam pariwisata Bali: Studi kasus Ubud. *E-Journal Ekonomi dan Pariwisata*, 12(4), 56–71.
- Sara, I. M. 2023. The green economic movement for sustainable development and the role of green governance: A study in villages in Bali. *International Journal of Social Science and Business*, 7(1), 45–54. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i1.54321>
- Sara, I. M., Sudarma, M., & Saputra, K. A. 2023. *The Green Economic Movement for Sustainable Development and The Role of Green Governance: A Study in*

- Villages in Bali*. International Journal of Social Science and Business, 7(4), ...
<https://doi.org/...> Ejournal Universitas Pendidikan Ganesha
- Suasih, N. N. R. 2024. Waste management policy in Bali Province, Indonesia. *Journal for Local Sustainable Solutions*, 1(2).
<https://ojs.journalsdg.org/ijss/article/view/2677>
- Surya Diputra, G. I. 2024. *Penerapan Green Economy Pada Sektor Pariwisata Di Bali*. Jurnal Ekuilnomi, 6(2), 182-193. <https://doi.org/10.36985/mbb4n278> Jurnal USI
- Suryani, N. K., & Mahadewi, L. P. 2023. Green service innovation dan kinerja UMKM pariwisata di Bali. *Jurnal Manajemen Inovasi*, 9(2), 89–104.
- Suryawan, I. W. K. 2025. Hypothetical scenarios for circular bioeconomy implementation: A case study of the Bali metropolitan area. *Sustainability*, 17(2), 1125.
<https://doi.org/10.3390/su17021125>
- The Guardian. 2024. *Bali plastic recycling scheme swamped with garbage*. The Guardian. Retrieved from <https://www.theguardian.com/environment/2024/nov/20/bali-plastic-recycling>
- The Guardian. 2024. Bali's recycling crisis: Why waste management projects struggle to deliver lasting change. Retrieved from <https://www.theguardian.com>
- Tietenberg, T., & Lewis, L. 2018. *Environmental and Natural Resource Economics*. (Publisher).
- Tundjungsari, V. (2025). An integrated model for circular waste management using IoT and gamification. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 22(4), 1345. <https://doi.org/10.3390/ijerph22041345>
- UN Partnership for Action on Green Economy (UN-PAGE). 2024. *Measuring the green economy: Core indicators for policy makers*. Geneva: United Nations.
- UNEP. 2011. *Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- United Nations Environment Programme (UNEP). 2011. *Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication*. UNEP. <https://www.unep.org/greeneconomy>
- Wicaksana, M. R. 2019. Unjuk kerja pembangkit listrik tenaga surya rooftop pada kantor gubernur Bali. *Jurnal Teknik Elektro*.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1353902>
- Wiriastika, I. N. (2022). Peran desa adat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan ekonomi lokal. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 325-330. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4842.325-330>
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.
- World Commission on Environment and Development. 1987. *Our Common Future*. Oxford University Press.
- Wulandari, N. P. P. 2024. *Multidimensional Challenges Toward Sustainable Development Tourism in Bali*. Bali Tourism Journal, 8(3), artikel. <https://doi.org/balitourismjournal.org>
- Wulandari, P. R. 2025. Dampak Implementasi Pertanian Berkelanjutan Terhadap Stabilitas Ekonomi Dan Pembangunan Daerah Tertinggal. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 5(2), 35-44.
- Wulandari, P. R., Saskara, I. A. N., Yasa, I. G. W. M., & Marhaeni, A. A. I. N. 2024. Key Variables for Farming Business Sustainability in Urban Subak. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(9), 1-15.
- Wulandari, P. R., Saskara, I. A. N., Yasa, I. G. W. M., & Marhaeni, A. A. I. N. 2023. Betting Scenario for Sustainability of Farming Bussines in Urban Areas. *Review of Economics and Finance*, 2023, 21, 2738-2746